



PENGARUH BELANJA DAERAH SEKTOR PARIWISATA DAN PERDAGANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BONTANG

<p>Info Article</p> <hr/> <p>Keywords: Regional Expenditure, Tourism Sector, Trade Sector, Non-Oil and Gas GRDP, Local Own-Source Revenue.</p> <p>Kata Kunci: Belanja Daerah, Sektor Pariwisata, Sektor Perdagangan, PDRB non Migas, Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze the influence of regional expenditures in the tourism and trade sectors on the non-oil and gas Gross Regional Domestic Product (GRDP) and their impact on Local Own-Source Revenue (PAD) in Bontang City, both directly and indirectly. The research employs a quantitative approach using path analysis to identify causal relationships among variables. The study uses ten-year time-series secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and local government financial documents. The results show that tourism sector expenditure has a positive and significant effect on non-oil and gas GRDP, while trade sector expenditure has a positive but insignificant effect. Non-oil and gas GRDP is also found to have a positive and significant effect on PAD. Additionally, there is an indirect effect of tourism expenditure on PAD through non-oil and gas GRDP, indicating that increased tourism spending can strengthen local economic activity. Conversely, the indirect effect of trade expenditure through non-oil and gas GRDP on PAD is not significant.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah pada sektor pariwisata dan sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis jalur (<i>path analysis</i>) dengan memanfaatkan data sekunder runtun waktu selama sepuluh tahun dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB nonmigas, sementara belanja sektor perdagangan berpengaruh positif namun tidak signifikan. PDRB nonmigas juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung belanja sektor pariwisata terhadap PAD melalui PDRB nonmigas, menandakan bahwa peningkatan anggaran pariwisata dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Sebaliknya, pengaruh tidak langsung belanja sektor perdagangan melalui PDRB nonmigas terhadap PAD tidak signifikan.</p>
---	---

INTRODUCTION

Implementasi otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu reformasi struktural paling signifikan dalam sistem pemerintahan modern. Kebijakan ini menandai pergeseran penting dari model pemerintahan yang sentralistik menuju pendekatan desentralisasi, di mana pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan fiskal, administratif, dan pembangunan. Secara filosofis, desentralisasi diyakini mampu meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat karena kedekatan geografis dan sosial yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kontekstual. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif.

Salah satu tujuan fundamental dari kebijakan otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemandirian tersebut adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah secara makro tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi ukuran nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dengan demikian, hubungan antara belanja pemerintah daerah, PDRB, dan PAD menjadi bagian krusial dalam mengevaluasi efektivitas implementasi otonomi daerah.

Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan struktural terkait keberlanjutan ekonomi. Secara historis, perekonomian kota ini sangat bertumpu pada sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas (migas). Ketergantungan yang tinggi pada sektor migas menciptakan risiko ekonomi jangka panjang, mengingat sifat sumber daya migas yang tidak terbarukan dan potensi penurunan produksi di masa depan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun strategi diversifikasi ekonomi guna memperkuat fondasi ekonomi nonmigas sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi ekonomi tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan APBD sebagai instrumen fiskal utama. APBD berfungsi tidak hanya sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong sektor-sektor strategis yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap

perekonomian daerah. Dua sektor nonmigas yang selama ini diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Keduanya dianggap memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Belanja pemerintah pada sektor pariwisata dan perdagangan secara teoritis diharapkan mampu menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah merupakan suntikan fiskal yang mampu meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan aktivitas konsumsi dan investasi. Belanja pada sektor pariwisata umumnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, pengembangan atraksi wisata, serta peningkatan fasilitas umum. Jika dikelola dengan baik, belanja tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan, pertumbuhan usaha jasa, serta peningkatan pendapatan masyarakat.'

Namun, fenomena empiris menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pariwisata dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linier. Di Kota Bontang, data belanja pariwisata memperlihatkan fluktuasi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa tahun menunjukkan lonjakan belanja yang besar, tetapi di tahun berikutnya justru terjadi penurunan drastis. Fluktuasi ini tidak selalu sejalan dengan perkembangan PDRB nonmigas yang cenderung stabil meningkat dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait efektivitas belanja pariwisata dalam mendorong pertumbuhan PDRB nonmigas.

Kondisi serupa juga terjadi pada belanja sektor perdagangan. Belanja pada sektor ini termasuk investasi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, revitalisasi pasar, pembangunan pusat distribusi, hingga perbaikan akses logistik. Dalam banyak teori ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, belanja sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat rantai pasok lokal. Namun data empiris di Bontang menunjukkan bahwa lonjakan belanja perdagangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PDRB nonmigas. Bahkan pada beberapa periode, ketika belanja perdagangan berada pada titik terendah, PDRB nonmigas tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Kesenjangan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu dianalisis secara ilmiah. Lebih jauh lagi, persoalan lain yang sangat krusial adalah hubungan antara PDRB nonmigas dan Pendapatan Asli Daerah. Secara teori, peningkatan PDRB seharusnya memperluas basis

penerimaan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi. Peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha, serta meningkatnya volume transaksi ekonomi seharusnya memberikan dampak positif terhadap PAD. Namun data empiris di Kota Bontang menunjukkan hal yang berbeda.

Meskipun PDRB nonmigas meningkat sangat signifikan selama periode observasi, tren PAD tidak menunjukkan pola yang konsisten. Pada beberapa tahun tertentu, ketika PDRB meningkat drastis, PAD justru mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi daerah, di mana pertumbuhan ekonomi tidak berhasil dikonversi menjadi peningkatan pendapatan fiskal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dominasi sektor-sektor yang memiliki basis pajak lemah, tingginya aktivitas ekonomi informal, lemahnya sistem administrasi pajak daerah, atau rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pajak. Dalam konteks pembangunan daerah, kegagalan untuk mengoptimalkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah menjadi sinyal peringatan penting. Hal ini dapat menghambat kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan jangka panjang, memperluas layanan publik, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap hubungan antara belanja daerah, PDRB nonmigas, dan PAD menjadi sangat penting dilakukan.

Selain hubungan langsung antarvariabel, penelitian ini juga menelaah peran PDRB nonmigas sebagai variabel mediasi. Secara konsep, belanja pemerintah pada sektor pariwisata dan perdagangan diharapkan mempengaruhi PAD melalui peningkatan PDRB nonmigas. Jika belanja efektif, maka PDRB meningkat, dan peningkatan tersebut pada akhirnya memperluas basis pajak daerah. Namun fenomena empiris di Kota Bontang justru memperlihatkan kegagalan mediasi tersebut pada beberapa periode. Meskipun belanja daerah meningkat dan PDRB nonmigas juga meningkat, PAD justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun stimulus fiskal berhasil mendorong aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi tersebut tidak terkonversi menjadi penerimaan fiskal.

Fenomena kegagalan transformasi ekonomi menjadi pendapatan ini merupakan masalah struktural yang memerlukan analisis ilmiah. Dalam literatur ekonomi publik dan ekonomi regional, masalah ini dikenal sebagai putusnya mata rantai fiskal, di mana pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, daerah akan berada dalam kondisi rentan terhadap ketergantungan fiskal dan ketidakmampuan dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

masalah utama yang perlu diteliti secara komprehensif. Pertama, efektivitas belanja daerah sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan PDRB nonmigas. Kedua, efektivitas belanja daerah sektor perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB nonmigas. Ketiga, hubungan antara PDRB nonmigas dan PAD yang menunjukkan ketidaksesuaian pola perkembangan. Keempat, peran PDRB nonmigas sebagai variabel mediasi yang belum menunjukkan efektivitas sesuai teori. Dari berbagai fenomena dan kesenjangan empiris tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilaksanakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus masukan strategis bagi Pemerintah Kota Bontang dalam merumuskan kebijakan belanja daerah yang lebih efektif, terarah, dan berbasis bukti.

METHOD

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh antarvariabel serta mengidentifikasi hubungan sebab-akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat penelitian termasuk *ex-post facto*, karena seluruh variabel dianalisis berdasarkan data historis tanpa adanya manipulasi terhadap objek penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtun waktu (*time series*) selama sepuluh tahun, yaitu periode 2014–2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah dinamika perubahan belanja daerah sektor pariwisata, belanja sektor perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dalam jangka menengah.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

a. Belanja Daerah Sektor Pariwisata.

Diukur berdasarkan total realisasi belanja operasi dan belanja modal pada urusan pemerintahan bidang pariwisata yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bontang. Data dinyatakan dalam satuan Rupiah dan menggunakan skala rasio.

b. Belanja Daerah Sektor Perdagangan.

Diukur dari total realisasi belanja sektor perdagangan yang meliputi pembinaan usaha, pengelolaan pasar, dan fasilitasi perdagangan. Data bersumber dari Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang, dinyatakan dalam Rupiah dan menggunakan skala rasio.

2. Variabel Intervening

PDRB nonmigas Adalah nilai tambah bruto seluruh aktivitas ekonomi Kota Bontang di luar sektor minyak dan gas, diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dinyatakan dalam Rupiah (skala rasio).

3. Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diukur berdasarkan total realisasi penerimaan dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data bersumber dari BPS dan LKPD Kota Bontang, dinyatakan dalam Rupiah dan menggunakan skala rasio.

Jangkauan Penelitian

Penelitian berlokasi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang dipilih secara purposive karena relevan dengan isu ketergantungan ekonomi terhadap sektor migas serta upaya diversifikasi ke sektor pariwisata dan perdagangan. Periode pengamatan adalah 2014–2023, sesuai ketersediaan data yang konsisten untuk seluruh variabel penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup:

1. Realisasi belanja sektor pariwisata,
2. Realisasi belanja sektor perdagangan,
3. Nilai PDRB nonmigas ADHK, dan
4. Realisasi PAD (pajak dan retribusi).

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Uji Asumsi Klasik

Analisis dilakukan pada dua substruktur model jalur, yaitu (1) pengaruh Belanja Sektor Pariwisata dan Belanja Sektor Perdagangan terhadap PDRB non Migas, dan (2) pengaruh PDRB non Migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh uji asumsi klasik dilakukan menggunakan metode OLS.

a. Uji Normalitas.

Hasil uji Kolmogorov–Smirnov menunjukkan bahwa residual pada kedua substruktur memiliki nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 ($> 0,05$), sehingga residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis inferensial.

Tabel 1. Uji Normalitas Substruktur 1 (Kolmogorov–Smirnov)

Keterangan	Unstandardized Residual
N	10
Normal Parameters (Mean)	0.0000000
Normal Parameters (Std. Deviation)	14.9200000
Most Extreme Differences (Absolute)	0.205
Most Extreme Differences (Positive)	0.205
Most Extreme Differences (Negative)	-0.188
Kolmogorov–Smirnov Z	0.648
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2025)

b. Uji Multikolinearitas

Nilai Tolerance seluruh variabel $> 0,10$ dan VIF < 10 . Artinya, tidak terdapat multikolinearitas antara Belanja Sektor Pariwisata dan Belanja Sektor Perdagangan, sehingga kedua variabel memberikan informasi yang independen dalam menjelaskan PDRB non Migas.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas Substruktur 1

Model	Tolerance	VIF
(Constant)	–	–
Belanja Sektor Pariwisata	0.963	1.039
Belanja Sektor Perdagangan	0.963	1.039

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2025)

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel $> 0,05$ pada kedua substruktur. Dengan demikian, tidak terdapat heteroskedastisitas dan varian residual dapat dianggap konstan.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas (Glejser) Substruktur 1

Model	t	Sig.
(Constant)	1.481	0.182
Belanja Sektor Pariwisata	-1.380	0.217
Belanja Sektor Perdagangan	0.645	0.540

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2025)

d. Uji Autokorelasi

Nilai Durbin–Watson pada substruktur 1 sebesar 1,638 berada pada daerah keraguan, namun tidak menunjukkan indikasi autokorelasi yang kuat. Pada substruktur 2, nilai DW = 2,304 berada dalam rentang bebas autokorelasi. Dengan demikian, model dinilai memenuhi asumsi independensi residual.

Tabel 4. Uji Autokorelasi (Durbin–Watson) Substruktur 1

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin–Watson
1	0.775	21.08080	1.638

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2025)

Analisis Regresi Substruktur 1 (Pengaruh Belanja Sektor Pariwisata dan Belanja Sektor Perdagangan terhadap PDRB non Migas)

Uji F menunjukkan bahwa model signifikan (Sig. = 0,002 < 0,05), sehingga kedua variabel secara simultan berpengaruh terhadap PDRB non Migas. Nilai Adjusted R² sebesar 0,775 menunjukkan bahwa 77,5% variasi PDRB non Migas dijelaskan oleh kedua variabel belanja tersebut.

Uji t menunjukkan bahwa:

- Belanja Sektor Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,004; Sig. = 0,005).
- Belanja Sektor Perdagangan berpengaruh positif namun tidak signifikan (B = 0,002; Sig. = 0,080).

Persamaan regresi:

$$Y_1 = 100,370 + 0,004X_1 + 0,002X_2$$

Analisis Regresi Substruktur 2 (Pengaruh PDRB non Migas terhadap PAD)

Uji F menunjukkan model signifikan (Sig. = 0,028 < 0,05). Nilai Adjusted R² sebesar 0,405 menandakan bahwa 40,5% variasi PAD dijelaskan oleh PDRB non Migas.

Uji t menunjukkan bahwa:

PDRB non Migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (B = 378,117; Sig. = 0,028).

Persamaan regresi:

$$Y_2 = 37.340,848 + 378,117Y_1$$

Analisis Jalur (Direct dan Indirect Effect)

Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Tabel 5. Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Jalur	Beta	Signifikansi	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,696	Sig	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,354	Tidak Sig	Tidak Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,686	Sig	Signifikan

Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

Perhitungan berdasarkan beta menghasilkan:

- $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = 0,477$
- $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = 0,243$

Uji Sobel menunjukkan:

- Jalur tidak langsung $X_1 \rightarrow Y_2$ signifikan ($Z = 2,22 > 1,96$).
- Jalur tidak langsung $X_2 \rightarrow Y_2$ tidak signifikan ($Z = 1,60 < 1,96$).

Dengan demikian, **PDRB non Migas berfungsi sebagai mediator signifikan pada jalur $X_1 \rightarrow Y_2$** , tetapi tidak pada jalur $X_2 \rightarrow Y_2$.

Discussion

Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pariwisata terhadap PDRB non Migas

Belanja sektor pariwisata terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB non Migas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pariwisata mampu mendorong aktivitas ekonomi riil di Kota Bontang, terutama melalui peningkatan kegiatan wisata, jasa, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang menempatkan belanja pemerintah sebagai komponen penting penggerak permintaan agregat (Mankiw, 2021). Belanja pemerintah dalam sektor pariwisata berperan sebagai stimulus fiskal yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi non migas.

Pengaruh Belanja Daerah Sektor Perdagangan terhadap PDRB non Migas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sektor perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB non Migas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh:

1. Dampak belanja perdagangan yang bersifat jangka panjang.
2. Kualitas program dan efektivitas realisasi belanja belum optimal.
3. Belanja perdagangan tidak langsung menghasilkan output ekonomi pada tahun yang sama.

Dengan demikian, kontribusi belanja sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi non migas masih belum kuat selama periode penelitian.

Pengaruh PDRB non Migas terhadap PAD

PDRB non Migas memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Aktivitas ekonomi yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat, volume transaksi, dan aktivitas produksi sehingga memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Temuan ini konsisten dengan teori kapasitas fiskal, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama peningkatan PAD.

Peran Mediasi PDRB non Migas

PDRB non Migas terbukti menjadi mediator signifikan pada jalur belanja pariwisata terhadap PAD. Artinya, belanja pariwisata tidak hanya meningkatkan PDRB non Migas secara langsung, tetapi peningkatan tersebut juga diteruskan menjadi kenaikan PAD. Sektor pariwisata terbukti sebagai sektor strategis yang memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, belanja sektor perdagangan tidak menghasilkan mediasi signifikan melalui PDRB non Migas, sehingga evaluasi kebijakan belanja pada sektor ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis jalur dan temuan empiris, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.

1. Belanja daerah sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB non migas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas. Hal tersebut sejalan dengan teori Keynesian dan konsep multiplier effect yang menegaskan bahwa belanja pemerintah pada sektor strategis memiliki dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi daerah.
2. Belanja daerah sektor perdagangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB non migas. Meskipun arah pengaruhnya sesuai dengan ekspektasi teoritis, besarnya dampak tidak cukup kuat secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi skala anggaran maupun orientasi program agar lebih produktif dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.
3. PDRB non migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi non migas memperluas basis penerimaan daerah melalui berbagai jenis pajak dan retribusi. Dengan demikian, penguatan sektor ekonomi non migas merupakan strategi penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
4. Belanja daerah sektor pariwisata berpengaruh tidak langsung, positif, dan signifikan terhadap PAD melalui PDRB non migas. Hal ini menunjukkan bahwa selain memberikan dampak langsung pada perekonomian, belanja pariwisata juga meningkatkan PAD melalui peningkatan PDRB non migas sebagai variabel mediasi.

Dengan demikian, pariwisata berfungsi sebagai sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pendapatan daerah.

5. Belanja daerah sektor perdagangan tidak memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap PAD melalui PDRB non migas. Meskipun hubungan yang terbentuk positif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk menciptakan efek mediasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya optimalisasi kebijakan belanja sektor perdagangan agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap PAD.

REFERENCES

- Abdullah, F., & Hakim, R. (2022). DAMPAK BELANJA SEKTOR PERDAGANGAN, INVESTASI SWASTA, DAN PDRB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 9(1), 45–58.
- Akamavi, R. K., Mah, G., & Pwadura, J. (2017). GOVERNMENT EXPENDITURE ON TOURISM, ECONOMIC GROWTH AND POVERTY REDUCTION. *Journal of Travel Research*, 56(1), 23–34.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan (Edisi ke-5)*. UPP STIM YKPN.
- Asante, B. O., Wiafe, E. D., & Eghan, B. (2022). IMPACT OF PUBLIC INVESTMENT IN MARKET INFRASTRUCTURE ON THE PERFORMANCE OF TRADERS IN GHANA. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 12(3), 445–460.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 4)*. Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Febrianti, R., & Huda, M. (2023). ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL SEKTOR PERDAGANGAN DAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 77–89.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi 5)*. Salemba Empat.

- Hidayat, A., & Falah, M. (2023). PENGARUH BELANJA MODAL URUSAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN PERTANIAN TERHADAP PDRB DI JAWA BARAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(2), 112–125.
- Hidayat, F., & Pradana, A. (2022). ANALISIS PENGARUH PDRB SEKTOR INFORMAL DAN FORMAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH TERTINGGAL. *Jurnal Ekonomi Regional*, 7(1), 45–59.
- Irawan, B., & Mulyati, S. (2024). ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PULAU KALIMANTAN TAHUN 2018–2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 25(1), 88–101.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Jones, C. I., & Vollrath, D. (2021). *Introduction to economic growth* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Kaho, J. R. (2018). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia: Kajian atas hubungan pusat dan daerah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kirui, E. K., Komen, J., & Chepng'eno, V. (2023). EFFECT OF GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE ON TOURISM SECTOR GROWTH IN KENYA. *African Journal of Empirical Research*, 4(1), 72–82.
- Lestari, E., & Wahyudi, S. (2022). PENGARUH BELANJA MODAL PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG. *Jurnal Ekonometrika Terapan*, 11(2), 101–115.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Manthofi, A., & Aisyah, S. (2024). PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10214–10223.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Edisi 3). ANDI.
- Mariani, M., Syarief, N., & Abdullah, S. (2024). THE ROLE OF GOVERNMENT SPENDING IN THE TOURISM SECTOR ON LOCAL REVENUE AND ECONOMIC GROWTH. *International Journal of Social Science and Public Policy*, 7(1), 110–120.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2017). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nona, R., Wahyuningtyas, I., Rizki, S. D., & Badia, B. A. (2025). STRATEGI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) SEBAGAI KUNCI

PENINGKATAN KEPUASAN KONSUMEN PADA INDUSTRI HASIL HUTAN KALIMANTAN TIMUR. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 4(03), 297–315. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v4i03.1810>

- Nugroho, S., & Santoso, A. (2023). ANALISIS ELASTISITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PDRB SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 134–149.
- Paramarta, V., Yuliarmi, N. N., & Setiawina, N. D. (2023). PENGARUH BELANJA SEKTOR PARIWISATA, INVESTASI SWASTA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BADUNG. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(8), 123–134.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Pratiwi, N., & Handayani, R. (2022). ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara*, 4(2), 201–218.
- Pusporini, I. D. (2020). ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(6), 485–508.
- Rahmawati, D., Cahyono, E., & Fitriyah, N. (2023). PENGARUH PDRB, INVESTASI, DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 301–312.
- Romer, D. (2019). *Advanced macroeconomics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2021). *Public finance* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rusneni, R., Nursini, N., Rahman, A. R., & Suhab, S. (2025). ANALYSIS OF THE ROLE OF TOURISM IN INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH. Dalam *Proceedings of the 9th International Conference on Accounting, Management, and Economics 2024 (ICAME 2024)*. Atlantis Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics* (21st ed.). McGraw-Hill Education.

- Saputra, A., & Wijaya, R. (2023). PENGARUH BELANJA SEKTOR PARIWISATA DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 10(1), 88–100.
- Sari, N. P., & Abdullah, M. (2022). PENGARUH STRUKTUR PEREKONOMIAN DAN PDRB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PULAU SUMATRA. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(2), 112–128.
- Sarundajang, S. H. (2017). *Sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Edisi 2)*. Kata Penerbit.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.)*. Wiley.
- Setyawan, D., Santoso, E. B., & Priyono, B. S. (2024). DAMPAK BELANJA PEMERINTAH URUSAN PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM TERHADAP PDRB DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6(1), 55–67.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia (Edisi 2)*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi (Edisi revisi)*. Bumi Aksara.
- Thoaha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer (Edisi 12)*. Kencana.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development (13th ed.)*. Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Wulandari, A., Kusuma, H., & Prasetyo, P. E. (2024). DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(1), 1–15.